

DPR Minta LPP RRI Jadi Penjernih Informasi dengan Bangun Narasi Kebangsaan



Realitarakyat.com – DPR mendorong lembaga penyiaran publik (LPP) RRI membangun narasi kebangsaan. Pasalnya, LPP RRI memiliki peran penting untuk menjernihkan informasi di ruang publik dan untuk mencerdaskan bangsa.

Apalagi, LPP RRI pada 11 September 2021 tepat berusia 76 Tahun, pada 2045 mendatang akan genap berusia 100 Tahun.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Baleg RI Willy Aditya dalam acara bedah buku Dewas RRI Freddy Ndolu berjudul 'Atas Nama Publik; Transformasi Lembaga Penyiaran Publik Sebagai Media Layanan Publik Multiplatform', di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (25/8/2021).

Hadir sejumlah narasumber membedah buku tersebut antara lain: Wakil Ketua Baleg DPR RI Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Muklis Basri, Mewakili Dewan Pers Asep Setiawan dan Pakar hukum tata negara Margarito Kamis, diskusi dimoderatori oleh Jurnalis Radar Lombok Erwin Syahfutra Siregar

“Saya mengapresiasi, saya dukung buku ini tapi dia harus jadi movement (gerakan). LPP kita bangun bersama-sama narasi kebangsaan. Sebab, kalau ini kita tidak jaga, ini anugerah besar di kolong langit ini bernama Indonesia, negara berbangsa, banyak suku agama,” kata Willy.

Menurut Willy, Indonesia merupakan negara besar yang terdiri atas beragam suku, agama, adat istiadat, dan budaya. Willy menyatakan sudah menjadi tugas LPP untuk menyiarkan narasi kebangsaan yang menyatukan.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR F-PDIP Muklis Basri juga menyambut baik hadirnya buku tersebut. Namun, ia berpesan agar sebelum mendorong dekrit pencerdasan bangsa, perlu seluruh komponen membenahi RRI, khususnya secara internal.

“Pesan saya kepada seluruh LPP RRI, benahi dulu internal, jangan ribut pada momentum tertentu saja,” ujar Muklis.

Menanggapi lebih dalam, mewakili Dewan Pers Asep Setiawan mendukung LPP RRI bertransformasi menjadi media layanan publik multiplatform. Memang, menurut Asep, cara menyampaikan informasi perlu ikut tuntutan zaman.

“Substansi jurnalistik, dengan menyampaikan informasi melalui media massa tidak akan pernah berubah. Membangun Indonesia, tetapi teknologi untuk mendeliver news berubah, kita sekarang menulis pakai gadget. Jadi substansi tidak berubah, hanya caranya berubah,” ujar Asep.

Pakar hukum Tata Negara Margarito Kamis turut memberikan masukan, bahwa RRI harus berani berbicara meskipun berbeda dengan pemerintah.

“Buku ini secercah harapan jika tidak bisa mengubah dunia, paling tidak Indonesia, di titik inilah saya mencoba mengapresiasi lahirnya buku ini,” tutur Margarito.

Penulis Buku Freddy Ndolu menegaskan, buku yang ia tulis adalah sebuah pemacu semangat bagi seluruh jurnalis di tanah air, untuk terus berkarya. Sebab, peran jurnalis sangatlah penting, sebagai penjaga demokrasi.

“RRI sekali lagi jangan dilihat sebagai radio lagi, Karena semua sudah terkorvensi. Ini semacam provokasi pemikiran, wartawan tugasnya mengedukate menginformasikan. Saya kira negara perlu memberikan satu payung hukum tegas berbentuk dekrit pencerdasan bangsa,” tandas Freddy.[prs]